

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kurikulum**

Adanya kebijakan tersebut mengimplikasikan bahwa kurikulum tidak lagi disusun oleh pemerintah sebagaimana yang terjadi pada penyusunan kurikulum terdahulu (Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1999, dan KBK yang baru dipilotingkan dan disosialisasikan), akan tetapi kurikulum dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan yang sekarang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Asep Herry Hernawan dan Rudi Susilana, 2008. “Konsep Dasar Kurikulum”. [www.upi.ac.id](http://www.upi.ac.id).)

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sesuai dengan pengertian tersebut, Kurikulum berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan nasional dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah dan madrasah

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat (Dadang Sukirman, 2007. “Landasan Pengembangan Kurikulum“. [www.upi.ac.id](http://www.upi.ac.id).)

Pengembangan silabus di satuan pendidikan sebenarnya bukan masalah yang asing dan baru bagi masing-masing sekolah. Sejak dahulu sekolah telah melaksanakan itu bersatu dengan perencanaan masing-masing sekolah dan perencanaan masing-masing guru. Hanya karena adanya Peraturan Pemerintah yang baru tentang standar pendidikan yang mengatur juga tentang pengembangan kurikulum satuan pendidikan maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Semoga aturan ini tidak menjadikan beban baru bagi guru maupun masing-masing satuan pendidikan.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut.

Seharusnya sebuah kurikulum dipatenkan selama beberapa lama agar dapat dilihat hasil dari pembelajaran tersebut. Jika kita melihat kenegara lain yang lebih maju, mereka memiliki SDM yang bagus, itu karena siswa mereka tidak dibuat bingung oleh perubahan yang begitu cepat. Kurikulum yang lama belum terserap langsung sudah terganti. Hal lain adalah banyaknya pemborosan biaya pendidikan termasuk untuk mencetak buku-buku yang pada akhirnya tidak terpakai, padahal seharusnya dapat digunakan untuk membiayai bidang-bidang lain dalam sektor pendidikan misalnya kesejahteraan guru, sehingga tidak akan terdengar lagi nada miris tentang nasib guru yang nyambi kerja jadi tukang ojek untuk mempertahankan asap dapur agar tetap ngepul (Taufik, 2002. "Perubahan Kurikulum Dapat Menentukan Nasib Baik Hasil Pendidikan". [www.diknas.go.id](http://www.diknas.go.id).)

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih.

Bahan ajar merupakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik. Keterkaitan antara fungsi dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar isi diwujudkan kedalam bahan kajian, seperangkat kompetensi lintas kurikulum dan mata pelajaran.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 (PP. 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan setiap

satuan pendidikan untuk menyusun dan mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Di samping itu, penyusunan KTSP mengakomodasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah mulai dilaksanakan sejak diberlakukannya otonomi daerah sehingga dengan penyusunan KTSP memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Sebagaimana pengembangan kurikulum yang lain, pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi didahului dengan evaluasi terhadap kurikulum yang berlaku sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan terhadap Kurikulum 94 antara lain adalah identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan kurikulum sebelumnya. Sumber dari kegiatan tersebut adalah berbagai pertemuan, seperti pelatihan, seminar dan sejenisnya maupun terbitan, mingguann, harian maupun paper dan laporan yang menggunakan kurikulum sebagai topik utamanya. Dari kegiatan identifikasi permasalahan kurikulum tersebut kita menemukan bahwa kurikulum 94 masih dianggap terlalu berat bagi sebagian sekolah. Berat dalam arti bahwa tidak semua sekolah mampu menyelesaikan beban kurikulum yang tercantum dalam dokumen kurikulum.

Adanya permasalahan tentang beratnya beban kurikulum terjadi karena adanya perbedaan kondisi dan situasi masing-masing satuan pendidikan yang tidak diakomodasi oleh kurikulum yang sifatnya terlalu sentralistik yang tidak memungkinkan satuan pendidikan mengembangkan sendiri kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Dengan memberikan kesempatan pada daerah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri dan tetap mengacu pada standar kompetensi dan aturan lain yang ditetapkan

secaranasional diharapkan satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Berikut ini adalah aturan dalam Standar Nasional Pendidikan yang merupakan dasar utama pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan

- a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
- b. Standar isi memuat : kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan
- c. Kurikulum pada tingkat satuan pendidikan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP
- d. Panduan berisi sekurang-kurangnya, berisi model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jalur kategori pendidikan formal kategori standar, dan model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jalur kategori pendidikan formal kategori mandiri Model-model tersebut sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket panduan Sistem Paket dan Sistem Kredit, dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester, panduan Sistem Paket dan Sistem Kredit
- e. Kurikulum Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, peserta didik
- f. Bersama dengan silabus dikembangkan berdasarkan kerangka dasar kurikulum (dan struktur kurikulumnya), standar kompetensi lulusan, kurikulum satuan pendidikan dikembangkan oleh Sekolah dan Komite sekolah
- g. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan disupervisi oleh Dinas Kabupaten/kota

Di samping itu pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat pasal lain yang walaupun tidak berkaitan langsung dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tetapi juga merupakan aturan yang mengikat pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Standar proses terdapat aturan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran

- h. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran memuat sekurang-kurangnya: tujuan pembelajaran; materi ajar; metode pengajaran; sumber belajar; penilaian hasil belajar
- i. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan: jumlah maksimal peserta didik per kelas, beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks per peserta didik, rasio jumlah peserta didik setiap pendidik, dan mengembangkan budaya membaca dan menulis
- j. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai tehnik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai dapat berupa: Tes tertulis; Observasi; Tes pretek; Penugasan perseorangan atau kelompok, dan untuk mata pelajaran selain kelompok matpel IPTEK penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- k. Pengawasan model pembelajaran meliputi: pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut

Kurikulum adalah seperangkat alat yang berfungsi untuk mengajar seseorang. Di sekolah misalnya, yang termasuk di dalam kurikulum adalah : Isi dari apa yang diajar, metodologi pengajaran (termasuk di dalamnya adalah alokasi waktu, buku pelajaran, dan cara mengajar di kelas), dan

penilaian hasil belajar (Anita Purnomosari, 2008. "Kurikulum Kita". [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com).)

Rencana kerja tahunan meliputi kalender pendidikan/akademik yang memuat jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, hari libur, jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya, mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal, genap, pendek (jika ada), penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya, buku teks pelajaran yang dipakai, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, jadwal rapat, rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun, jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir

Faktor pendukung pelaksanaan Kurikulum 2004 untuk mata pelajaran matematika adalah kebijakan sekolah untuk mengirim guru mengikuti pelatihan dan penyediaan anggaran untuk mendukung kreatifitas guru. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak tersedianya buku pegangan siswa secara memadai dan masih diadakannya Ulangan Umum Bersama (Sugiyem, 2005. *Tesis* "Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2004 untuk Mata Pelajaran Matematika di SMP". [www.pasca.uns.ac.id](http://www.pasca.uns.ac.id).)

Pada standar penilaian terdapat pasal yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk : ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas. Penilaian digunakan untuk menilaian pencapaian

kompetensi, bahan penyusunan laporan kemajuan belajar, memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian, ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif,

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan dilakukan melalui:

Pengamatan untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi dan kepribadian, dan ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif. Mengingat bahwa aturan-aturan tersebut memiliki kaitan satu sama lain dan mempengaruhi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan maka pembahasan kurikulum satuan pendidikan terkait secara keseluruhan ketika masing-masing satuan pendidikan membuat perencanaan pendidikan di satuan pendidikan tersebut.

## **2. Silabus**

Pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam

penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang tadinya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan dilakukannya penyempurnaan kurikulum ini mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 ayat 1 tentang standar nasional pendidikan berkenaan dengan standar isi, proses, dan kompetensi lulusan.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan, mengingat mutu pendidikan kita belum optimal. Dari berbagai analisis diyakini bahwa salah satu faktor penyebab masalah tersebut adalah terpusatnya pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan sehingga sering terjadi kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi daerah atau sekolah setempat.

Salah satu bentuk kebijakan dari desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah lahirnya manajemen berbasis sekolah (MBS) di mana warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat) diberi kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam arti penjabaran lebih lanjut “Kurikulum yang berlaku secara Nasional” maupun pelaksanaannya di sekolah.

Kewenangan sekolah dalam mengelola kurikulum ini diwujudkan pada pengembangan silabus dan pelaksanaannya sebagai penjabaran dari kurikulum yang berlaku secara nasional. Pengembangan silabus dan pelaksanaannya di sekolah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan demikian, daerah atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan suatu proses belajar mengajar.

Dengan demikian, sekolah diharapkan dapat mengelola kurikulum sendiri, mampu melakukan manajemen berbasis sekolah, mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya, memiliki fleksibilitas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal, serta melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan sekolah.

Dalam pelaksanaannya kurikulum perlu dipantau untuk melihat perkembangan pelaksanaan di lapangan. Selama ini pemantauan lebih banyak dilaksanakan oleh pusat, maka agar hasilnya lebih sesuai maka pemantauan juga dilaksanakan oleh pihak setempat.

Agar sekolah dan atau daerah dapat mengembangkan silabus sendiri, menyesuaikan dengan kondisi daerah (prinsip diversifikasi) dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kurikulum di daerahnya, seperti telah disampaikan di atas diperlukan kelompok kerja yang secara khusus menangani kegiatan-kegiatan tersebut yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kelompok kerja dimaksud tersebut dinamakan tim pengembang kurikulum.

Sesuai dengan landasan yuridisnya, pengembangan silabus satuan pendidikan mengacu pada dua hal. Acuan yang pertama adalah acuan yang sifatnya telah ditetapkan secara nasional dan harus diikuti. Acuan yang ke dua adalah contoh, model, panduan yang sifatnya akan mempermudah satuan pendidikan untuk mengembangkan silabus. Yang pertama wajib diikuti, yang kedua jika satuan pendidikan mengalami kesulitan dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan maka contoh, model dan panduan tersebut dapat dijadikan pedoman. Sehubungan dengan hal tersebut maka berikut ini adalah dokumen yang akan dikembangkan oleh pemerintah pusat yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan untuk mengembangkan silabus

- a. Dokumen yang harus diikuti oleh masing-masing satuan pendidikan
- Standar pendidikan yang dijadikan pedoman dalam pengembangan silabus di satuan pendidikan yang sifatnya telah ditetapkan secara nasional adalah : Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, beban belajar serta Kalender Pendidikan.
- b. Dokumen yang dapat dijadikan panduan dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan

Dokumen lain yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan silabus di satuan pendidikan antara lain adalah: Contoh silabus, bahan ajar, model satuan kredit semester, model sekolah standar mandiri, model kegiatan belajar mengajar, model penilaian, model tematis di kelas awal SD, model diversifikasi kurikulum, model pembelajaran pembiasaan, model pembelajaran terintegrasi untuk mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS di SLTP/SLTA.

Silabus satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran merupakanjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, waktu yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, pengalaman belajar (learning experience) yang bisa diselenggarakan oleh guru untuk peserta didik, penilaian untuk kompetensi dasar dan indikatornya serta sumber belajar yang disarankan.

Bahan ajar masing-masing satuan pendidikan masing-masing mata pelajaran. berisi perencanaan pembelajaran dengan menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran, mulai dari membuat perencanaan tahunan, semester, pembuatan bahan ajar untuk sekali atau beberapa kali tatap muka. Model bahan ajar juga menjelaskan tentang gambaran masing-masing mata pelajaran, perubahannya dari kurikulum sebelumnya serta landasan perubahannya.

Sistem Satuan Kredit Semester merupakan pengaturan pengelolaan kelas, administrasi pembelajaran, pengaturan guru serta jadwal pembelajaran serta perubahan-perubahan yang lain yang harus dilakukan oleh sekolah jika satuan pendidikan tersebut menggunakan sistem satuan kredit semester. Sistem SKS merupakan sistem yang dapat dipilih oleh Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas untuk jalur formal standar serta merupakan sistem yang wajib diikuti oleh Sekolah Menengah Atas untuk jalur formal mandiri.

Sistem Paket merupakan pengaturan pengelolaan kelas, administrasi pembelajaran, pengaturan guru serta pembelajaran yang dapat dilakukan jika satuan pendidikan tersebut akan menggunakan sistem paket. Sistem paket merupakan sistem yang dilaksanakan di Sekolah Dasar, merupakan pilihan di SMP maupun SMA untuk jalur formal standar.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jalur formal kategori mandiri adalah contoh penambahan, peningkatan, serta penganekaragaman kurikulum yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan apabila akan melaksanakan jalur formal mandiri.

### **3. Pendekatan Penilaian**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penilaian kurikulum akan menentukan jenis data dan bagaimana data itu seharusnya dikumpulkan dan digunakan. Dua pendekatan pokok yang biasanya diterapkan dalam penilaian kurikulum, yaitu (1) *scientific ideals approach*, and (2) *humanistic ideals approach*.

*Scientific ideals* adalah pendekatan penilaian kurikulum yang cenderung memusatkan kepada hasil atau pengaruh. Nilai tes anak didik merupakan bagian penting dari data yang dikumpulkan. Data tersebut digunakan untuk perbandingan prestasi anak didik dalam situasi yang berbeda, di mana setiap situasi dikontrol

sebanyak mungkin. Data yang dikumpulkan melalui pendekatan ini adalah data kuantitatif, sehingga data tersebut dapat dianalisa secara statistik. Keputusan tentang tindak lanjut kurikulum dibuat atas dasar perbandingan data yang diperoleh dari penilaian kurikulum.

*Humanistic ideals* adalah pendekatan penilaian kurikulum melalui serangkaian pengamatan terhadap kurikulum yang sedang berlaku. Pengamatan diarahkan kepada penemuan dan pembuktian kasus yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum. Dengan demikian, data yang dikumpulkan melalui pendekatan ini adalah gejala-gejala yang dilihat pada saat pengamatan berlangsung. Usaha untuk manipulasi atau mempengaruhi pelaksanaan kurikulum sebelum dilakukan pengamatan akan mengurangi sifat alamiah dari pendekatan ini. Data yang diperoleh akan berupa data kualitatif, yang artinya data tersebut menunjukkan kesan penilai terhadap apa yang diamati dan gambaran kejadian nyata yang terjadi selama pengamatan. Analisa data akan berbentuk pembahasan hubungan dan pola berbagai pengamatan. Strategi penilaian kurikulum akan menunjukkan cara bagaimana penilaian itu dilaksanakan dari tahap permulaan sampai dengan tahap akhir. Strategi penilaian kurikulum sangat penting untuk digunakan oleh para penilai dalam melakukan penilaian kurikulum.

Sejumlah teoritikus dalam pengembangan kurikulum telah menentukan sendiri model-model untuk penilaian kurikulum. Berikut ini akan dibahas beberapa model penilaian serta tokoh yang mengembangkannya. Penilaian kurikulum mengembangkan model penilaian sumatif dan formatif. Perbedaan pokok diantaranya sumatif dan formatif adalah (1) tujuan, (2) waktu, dan (3) tingkat generalisasi. Penilaian formatif adalah penilaian terhadap kualitas kurikulum yang dilakukan setiap saat atau terus menerus selama proses pelaksanaan kurikulum berlangsung. Hasil penilaiannya digunakan sebagai data pelengkap dalam penilaian akhir keseluruhan pelaksanaan kurikulum. Sebaliknya, penilaian sumatif

adalah penilaian menyeluruh yang dilakukan terhadap kualitas kurikulum pada akhir suatu periode pelaksanaan program kurikulum. Hasil penilaiannya digunakan sebagai pertimbangan akhir terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

Penilaian formatif merupakan alat yang jauh lebih bermanfaat dari pada penilaian sumatif, walaupun pada dasarnya kedua penilaian tersebut diperlukan. Alasannya yaitu dengan penilaian sumatif dapat memungkinkan adanya perubahan besar-besaran terhadap suatu kurikulum. Sedangkan dengan penilaian formatif hanya memungkinkan adanya *feedback* setiap saat atau terus menerus terhadap pengembangan kurikulum, karena kurikulum bukan merupakan barang yang tetap. Dengan kata lain, kurikulum dapat diperbaiki dalam proses pelaksanaan kurikulum itu sendiri.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Yoenanto (2007) tentang “Problematika Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Studi Kasus Guru Sekolah Dasar di Kota Surabaya)” mengemukakan bahwa 1) guru memiliki pemahaman yang cukup baik tentang KBK, 2) faktor pendukung dalam pelaksanaan KBK antara lain: a) kreatifitas guru, b)kemampuan guru, c)penguasaan materi yang baik, d) pendidikan guru, e) media pengajaran/alat peraga dan sarana PBM yang memadai, f) orang tua yang kooperatif, g) lingkungan sekolah dan ruang kelas yang nyaman dan h) kreativitas siswa. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan KBK yaitu: a) kurang penguasaan materi dalam mengajar, b) guru kurang kreatif, c) kurang minatnya dalam pengajaran model KBK, d) kurang memahami konsep KBK, e) administrasi pekerjaan guru spt membuat silabi & penilaian terlalu banyak, f) jumlah siswa yang terlalu banyak, g) alat peraga yang kurang memadai dan h) evaluasi yang terlalu rumit serta 3) problematika yang dihadapi guru dalam pelaksanaan KBK antara lain: a) jumlah murid terlalu banyak/kurang ideal untuk

model KBK, b) Pemahaman guru tentang KBK yang masih lemah, c) Media yang terbatas/kurang menunjang menghambat PBM, d) Lembar evaluasi untuk non tugas dan portofolio belum siap pakai, e) Guru masih menggunakan metode mengajar model lama, f) Siswa yang memiliki IQ rendah, kurang siap mengikuti KBK, SDM guru yang masih belum cukup memadai, g) kesiapan guru, sekolah dan orangtua dalam KBK masih kurang memadai dan h) Guru kurang kreatif.

Persamaannya dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah pada kurikulum secara umum, perbedaannya pada silabus, penilaian hasil belajar, subjek dan lokasi penelitian, maka penelitian yang dilaksanakan peneliti bersifat mengembangkan pada penelitian yang sudah ada, sehingga layak dilaksanakan.

Hasil penelitian Maskur (2007) tentang "Studi Komparatif Antara Kurikulum Pendidikan Dasar 1994 Dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi", menyebutkan bahwa Upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olah raga, dan perilaku. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup (*life-skills*) yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan demikian peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan

Persamaannya dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah tentang kurikulum secara umum, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti laksanakan adalah peneliti memfokuskan masalah pengembangan silabus dan penilaian hasil belajar siswa pada KTSP, pada penelitian Maskur pada kurikulum 1994 dan KBK 2004. Jadi, penelitian ini layak dilaksanakan.